



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam penyajian Rencana kerja ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan kesempurnaan Renja ini.

Kuala Tungkal, 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA | 2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Daerah Tahun Lalu	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III Tujuan dan Sasaran DPMD	31
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD.....	31
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMD	43
BAB V Penutup	53

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD dan Pencapaian Renstra DPMD s/d Tahun 2023	8
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD.....	18
Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	20
Tabel T-C.32.Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2024	30
Tabel T-C.33.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan;

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran, Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk menjabarkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2023 akan menjadi perbandingan dengan Rencana Kerja Tahun 2024, sehingga akan dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 secara sistematika disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD**BAB V. PENUTUP****LAMPIRAN**

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMD**

Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2023 sebagai berikut;

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, yaitu;

a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari 1(satu) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran Rp43.951.000,-

b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp3.620.177.496,- terdiri dari 2(dua) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp3.428.307.496,-.

2. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp191.870.000,-

c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari, terdiri dari 1(satu) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp45.000.000,-

d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp328.696.200,- terdiri dari 6(enam) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesarRp3.404.000,-

2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp42.980.000,-

3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp10.500.000,-

4. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp40.558.000,-

5. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp4.080.000,-

6. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp227.174.200,-

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp104.950.000,- dengan sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp104.950.000,-.

f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar Rp77.569.000,- terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran Rp2.000.000,-
2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran Rp56.000.000,-
3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp19.569.000,-

g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp142.488.200,-, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp123.198.200,-
2. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp7.290.000,-
3. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp12.000.000,-

II. Program Penataan Desa

Program ini dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa adalah upaya meningkatkan penataan desa dengan anggaran Rp99.362.000,- dengan sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa dengan anggaran Rp99.362.000,- untuk melakukan perubahan status Desa Sungai Ari (Desa Suban Kecamatan Batang Asam) dan Desa Rimbo Asri (Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi)

III. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp647.976.800,- yang terdiri dari;

1. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan anggaran Rp176.300.000,- untuk melaksanakan penyaluran dan pembinaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
2. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan anggaran Rp77.393.000,-. Untuk melakukan pembinaan terhadap kepala desa yang terpilih.
3. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa dengan anggaran sebesar Rp94.358.000,- untuk melaksanakan pembinaan terhadap pengurus BUMdesa.
4. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa dengan anggaran Rp44.825.000,- untuk tenaga operator aplikasi prodeskel.

5. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa dengan anggaran Rp65.300.000,- untuk pembinaan aset desa.
 6. Sub kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa dengan anggaran Rp86.544.000,-
 7. Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan untuk penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan dengan anggaran Rp103.256.800,-
- IV. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Program ini dengan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp1.248.733.050,- yang terdiri dari;

1. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat dengan anggaran Rp164.405.000,- untuk pelaksanaan lomba posyandu
2. Sub kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dengan anggaran Rp84.328.200,- untuk perlombaan teknologi tepat guna
3. Sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp999.999.850,- untuk pelaksanaan 10 program pokok PKK.

Berikut disajikan Tabel T-C.29;

Tabel T-C 29
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1	2	3	4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			7=(6/5)	8	Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (2022)	Tingkat Realisasi (%)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan) tahun 2023)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DPMD	70	59,81	65	68,29	100%	67	67	100%	
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%	
Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan triwulan	8 laporan triwulan	8 laporan triwulan	8 laporan triwulan	100%	8 laporan triwulan	8 laporan triwulan	100%	
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang	26 orang	26 orang	25 orang	96%	26 orang	25 orang	96%
Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiat Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaiat dinas beserta atribut kelengkapannya	100 paket	51 paket	51 paket	49 paket	96%	100 paket	100 paket	100%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	0	0	0	0%	0	0	0%
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%

Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1224 paket	310 paket	1020 paket	1020 paket	100%	600 paket	600 paket	100%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1500 dokumen	1050 dokumen	1050 dokumen	1050 dokumen	100%	1500 dokumen	1500 dokumen	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	750 laporan	400 laporan	400 laporan	400 laporan	100%	350 laporan	350 laporan	45%
Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan BMD	28 unit	0	0	0	0%	0	0	0%
Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	11 unit motor dan 1 unit mobil kepala dinas	0	0	0	0%	0	0	0%
Sub Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit mobil operasional	0	0	0	0%	1 unit	1 unit	100%
Sub Kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	64 unit	0	0	0	0%	0	0	0%

Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17 unit	0	0	0	0	0%	8 unit	8 unit	53%
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan kenyamanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit mobil dan 10 unit motor	3 unit mobil dan 10 unit motor	3 unit mobil dan 10 unit motor	3 unit mobil dan 10 unit motor	3 unit mobil dan 10 unit motor	100%	3 unit mobil dan 10 unit motor	3 unit mobil dan 10 unit motor	100%
Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100%	40 unit	40 unit	100%

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1 unit	2 unit	1 unit	50%	2 unit	2 unit	67%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	100%	114 Desa	114 Desa	100%
Sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	2 desa	0 desa				2 desa	2 desa	100%
Sub kegiatan fasilitasi tata wilayah desa	Jumlah desa yang difasilitasi penataan wilayahnya	114 desa	8 desa				2 desa	2 desa	7%
Program Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	100%	13 BKAD	13 BKAD	100%
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	100%	114 Desa	114 Desa	100%

Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			100%
Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	100%	114 Desa	114 Desa	100%
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	100%	114 Desa	114 Desa	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen							100%
Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	456 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0%
Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	456 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0%
Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	684 Dokumen	114 Dokumen	114 Dokumen	114 Dokumen	114 Dokumen	100%	114 Dokumen	114 Dokumen	50%
Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	342 orang	0	157 orang	157 orang		0%	57 orang	57 orang	100%

Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	114 laporan	0	43 laporan	43 laporan	100%	0	0	38%
Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegeasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegeasan batas desa	40 Desa	9 Desa	10 Desa	10 Desa	80%	10 Desa	10 Desa	73%
Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	50%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<p>Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaksanaannya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota</p>	<p>Jumlah PKK dan Posyandu yang diberdayakan</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>100%</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>100%</p>
<p>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat yang diingkatkan kapasitasnya</p>	<p>Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat yang diingkatkan kapasitasnya</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>100%</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>100%</p>
<p>Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</p>	<p>Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</p>	<p>6 laporan</p>	<p>1 laporan</p>	<p>1 laporan</p>	<p>1 laporan</p>	<p>100%</p>	<p>1 laporan</p>	<p>1 laporan</p>	<p>50%</p>
<p>Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p>	<p>Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p>	<p>4 laporan</p>	<p>0 laporan</p>	<p>0 laporan</p>	<p>0 laporan</p>	<p>0%</p>	<p>0 laporan</p>	<p>0 laporan</p>	<p>0%</p>

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	40%
---	---	-----------	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut penyajian analisis pencapaian kinerja perangkat daerah pada Tabel T-C.30;

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
1			Persentase pengentasan Desa Tertinggal	87,50%	100%	100%	100%	100%	87,50%	100%	100%	100%	100%	
2			Persentase peningkatan Desa Mandiri	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%	1,09%	1,08%	1,08%	
3	Persentase desa yang tertata dengan baik			100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	-	
4	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi			-	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	-	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	
5	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi			114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	
6	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Untuk menuju masyarakat desa yang mandiri, DPMD perlu mengangkat isu-isu kembali faktor-faktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya batas desa dengan titik koordinat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati
2. Pembinaan, dan Penyaluran dana desa dan Alokasi Dana Desa
3. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan
4. Belum optimalnya kerjasama desa
5. Belum optimalnya BUM desa dan BUM desa Bersama
6. Penyelenggaraan Pilkades

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80	5.658.420	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80	5.658.420		
			Nilai SAKIP DPMD	68				Nilai SAKIP DPMD	68			
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	6 dokumen	60.000	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	6 dokumen	60.000		
01.2.01.06	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. Tanjungbar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan triwulan	60.000	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. Tanjungbar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan triwulan	60.000		

01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	3.644.100	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	3.644.100
01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang	3.450.000	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang	3.450.000
01.2.02.02	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	194.100	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	194.100
01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	70.900	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	70.900
01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket pakakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100 paket	53.900	Sub Kegiatan Pengadaan Pakakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket pakakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100 paket	53.900
01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	17.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	17.000
01.02.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah		Persentase cakupan layanan administrasi umum	100%	726.420	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah		Persentase cakupan layanan administrasi umum	100%	726.420
01.02.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	9.000	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	9.000

01.02.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	46.000	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	46.000
01.02.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1224 paket	21.420	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1224 paket	21.420
01.02.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	43.000	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	43.000
01.02.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1500 dokumen	7.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1500 dokumen	7.000
01.02.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dalam dan luar Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550 laporan	600.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dalam dan luar Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600 laporan	600.000
01.2.07	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pengadaan BMD	11 unit	465.000	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pengadaan BMD	11 unit	465.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.2.07.01	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit mobil operasional	330.000	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit mobil operasional	330.000
01.2.07.05	Sub Kegiatan pengadaan mebel	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit lemari	105.000	Sub Kegiatan pengadaan mebel	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit lemari	105.000
01.2.07.06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit (2 unit printer, 3 unit laptop, 1 unit scanner)	30.000	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit (2 unit printer, 3 unit laptop, 1 unit scanner)	30.000
01.02.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase peningkatan kenyamanan kantor	100%	94.000	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase peningkatan kenyamanan kantor	100%	94.000
01.02.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000
01.02.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	67.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	67.000
01.02.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	25.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMD Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	25.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	598.000	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	598.000	
01.02.09.01	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit mobil dan 10 unit motor	165.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit mobil dan 10 unit motor	165.000	
01.02.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	15.000	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	15.000	
01.02.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	418.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMMD Kab. Tanjab bar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	418.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.228.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.228.000	
2.13.02	Program Penataan Desa		Persentase desa dengan penataan yang baik	100%	250.000	Program Penataan Desa		Persentase desa dengan penataan yang baik	100%	250.000	

2.13.02.2.01	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan desa	114 Desa	250.000	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan desa	114 Desa	250.000
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	2 desa	250.000	Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	2 desa	250.000
2.13.03	Program Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa		Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	160.000	Program Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa		Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	160.000
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota		Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	114 Desa	160.000	Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota		Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	114 Desa	160.000
2.13.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	1 dokumen	160.000	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	1 dokumen	160.000
2.13.03.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dokumen	3.581.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dokumen	3.581.000
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 Desa	3.581.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 Desa	3.581.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 Desa	161.000	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 Desa	161.000
2.13.04.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	114 dokumen	203.000	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	114 dokumen	203.000
2.13.04.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	114 dokumen	220.000	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	114 dokumen	220.000
2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	320.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	320.000
2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	129 orang	251.000	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	170 orang	251.000
2.13.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen	750.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen	750.000
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen profil desa	1 dokumen	287.000	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Kab. Tanjung bar	Jumlah dokumen profil desa	1 dokumen	287.000

2.13.04.2 .01.13	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	114 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	114 dokumen	400.000
2.13.04.2 .01.14	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	212.000	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	212.000
2.13.04.2 .01.15	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 desa	360.000	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 desa	360.000
2.13.04.2 .01.16	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	114 laporan	167.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	114 laporan	167.000
2.13.04.2 .01.18	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	250.000	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	250.000
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	2.237.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	2.237.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

<p>2.13.05.2 .01</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang melakukan hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota</p>		<p>Jumlah PKK dan Posyandu yang diberdayakan</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>2.237.000</p>	<p>Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat melakukan hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota</p>	<p>Jumlah PKK dan Posyandu yang diberdayakan</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>2.237.000</p>
<p>2.13.05.2 .01.03</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/keurahan dan Masyarakat hukum adat</p>	<p>Kab. Tanjab bar</p>	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/keurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>650.000</p>	<p>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/keurahan dan Masyarakat hukum adat</p>	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/keurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya</p>	<p>422 lembaga</p>	<p>650.000</p>

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 dokumen	200.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 dokumen	200.000	
2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	160.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	160.000	
2.13.05.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	127.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tanjab bar	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	127.000	
2.13.05.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	1.100.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjab bar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	1.100.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C. 32
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMD

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif, penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu :

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Kementerian Dalam Negeri

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat yaitu :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana

Faktor Pendorong, yaitu;

1. Adanya bantuan keuangan dari pemerintah
2. Adanya SDA yang banyak
3. Adanya peraturan dari pemerintah

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan capaian target kinerja tahun lalu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan misi, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memperjelas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tujuan dan sasaran serta untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, tujuannya adalah meningkatkan keberdayaan desa dengan sasarnya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka sasaran program yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penataan desa
- b. Meningkatnya kerjasama yang dilakukan oleh desa
- c. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- d. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan sudah berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung barat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah untuk pencapaian tujuan dan sasaran, kemudian dengan memperhatikan beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain;

1. Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik.
3. Masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna.
4. Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong.
5. Terbatasnya tenaga teknis pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait, maka program kerja yang akan direncanakan Tahun 2024 ini adalah sebagaimana berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub kegiatan pengadaan mebel
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Penataan Desa

Kegiatan penyelenggaraan penataan desa dengan sub kegiatan;

- Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa

III. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan sub kegiatan;

- Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan sub kegiatan;

- Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa
- Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- Fasilitasi penyusunan profil desa
- Fasilitasi pengelolaan aset desa
- Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
- Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
- Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa
- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan;

- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Berikut Tabel T-C.33;

T-C. 33

Runusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	4	5	6	Rp 5.658.420.000		8	9	Rp 5.133.520.000		
				80					81			
01.	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	DPMMD Kab. Tanjungbar	70	6 dokumen	Rp 60.000.000			71	Rp 65.000.000		
				80					81			
01.2.01	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMMD Kab. Tanjungbar	8 laporan triwulan	8 laporan triwulan	Rp 60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 laporan triwulan	Rp 65.000.000		
01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan		100%	Rp 3.644.100.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	Rp 3.694.200.000		
01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPMMD Kab. Tanjungbar	26 orang	Rp 3.450.000.000				26 orang	Rp 3.500.000.000		

01.2.02.02	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMD Kab. Tanjungbar	12 dokumen	Rp	194.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dokumen	Rp	194.200.000
01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawatan perangkat daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai		100%	Rp	70.900.000		100%	Rp	71.900.000
01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakatan Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakatan dinas beserta atribut kelengkapan	DPMD Kab. Tanjungbar	100 paket	Rp	53.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 paket	Rp	53.900.000
01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPMD Kab. Tanjungbar	3 orang	Rp	17.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 orang	Rp	18.000.000
01.02.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan layanan administrasi umum		100%	Rp	726.420.000		100%	Rp	830.420.000
01.02.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DPMD Kab. Tanjungbar	12 paket	Rp	9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 paket	Rp	10.000.000
01.02.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPMD Kab. Tanjungbar	12 paket	Rp	46.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 paket	Rp	47.000.000
01.02.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	DPMD Kab. Tanjungbar	1224 paket	Rp	21.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1224 paket	Rp	21.420.000
01.02.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPMD Kab. Tanjungbar	12 paket	Rp	43.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 paket	Rp	44.000.000

01.02.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	DPMD Kab. Tanjabbbar	1200 dokumen	Rp 7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1200 dokumen	Rp 8.000.000
01.02.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dalam dan luar Kab. Tanjabbbar	550 laporan	Rp 600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	650 laporan	Rp 700.000.000
01.2.07	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan BMD		47 unit	Rp 465.000.000		34 unit	Rp 145.000.000
01.2.07.01	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	DPMD Kab. Tanjabbbar	11 unit	Rp 330.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
01.2.07.05	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	DPMD Kab. Tanjabbbar	30 unit	Rp 105.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30 unit	Rp 105.000.000
01.2.07.06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	DPMD Kab. Tanjabbbar	3 unit	Rp 30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 unit	Rp 40.000.000
01.02.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan kenyamanan kantor		100%	Rp 94.000.000		100%	Rp 96.000.000
01.02.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	DPMD Kab. Tanjabbbar	12 laporan	Rp 2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	Rp 2.000.000
01.02.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DPMD Kab. Tanjabbbar	12 laporan	Rp 67.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	Rp 68.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPMD Kab. Tanjabbar	12 laporan	Rp 25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	Rp 26.000.000
01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		100%	Rp 598.000.000		100%	Rp 231.000.000
01.02.09.01	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPMD Kab. Tanjabbar	3 unit mobil dan 10 unit motor	Rp 165.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 unit mobil dan 10 unit motor	Rp 170.000.000
01.02.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	DPMD Kab. Tanjabbar	40 unit	Rp 15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40 unit	Rp 16.000.000
01.02.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DPMD Kab. Tanjabbar	3 unit	Rp 418.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 unit	Rp 45.000.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 6.228.000.000			Rp 7.201.000.000
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan yang baik		100%	Rp 250.000.000		100%	Rp -
2.13.02.2.01	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan desa		114 Desa	Rp 250.000.000		114 Desa	Rp -

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Desa persiapan Sungai Ari, Kec. Batang Asam dan Desa Rimbo Asri, Kec. Tebing Tinggi	2 desa	Rp 250.000.000				
2.13.03	Program Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi		13 BKAD	Rp 160.000.000			13 BKAD	Rp 170.000.000
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya		114 Desa	Rp 160.000.000			114 Desa	Rp 170.000.000
2.13.03.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Tanjabbar	1 dokumen	Rp 160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	Rp 170.000.000
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi		114 Desa	Rp 3.581.000.000			100%	Rp 4.621.000.000
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya		114 Desa	Rp 3.581.000.000			100%	Rp 4.621.000.000
2.13.04.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	Kab. Tanjabbar	114 dokumen	Rp 161.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114 dokumen	Rp 161.000.000

2.13.04.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Kab. Tanjabbar	114 dokumen	Rp 203.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114 dokumen	Rp 203.000.000
2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjabbar	114 dokumen	Rp 220.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114 dokumen	Rp 220.000.000
2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Jumlah aparaturn pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Kab. Tanjabbar	129 orang	Rp 320.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170 orang	Rp 400.000.000
2.13.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Kab. Tanjabbar	1 dokumen	Rp 251.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	Rp 251.000.000
2.13.04.2.01.09	Sub Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab. Tanjabbar	15 laporan	Rp 750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56 laporan	Rp 1.980.000.000
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	Kab. Tanjabbar	1 dokumen	Rp 287.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	Rp 287.000.000
2.13.04.2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	Kab. Tanjabbar	1 dokumen	Rp 400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	Rp 120.000.000
2.13.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Kab. Tanjabbar	114 orang	Rp 212.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114 orang	Rp 212.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.15	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Tanjabbbar	10 desa	Rp	360.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 desa	Rp	370.000.000
2.13.04.2.01.16	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	Kab. Tanjabbbar	114 laporan	Rp	167.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114 laporan	Rp	167.000.000
2.13.04.2.01.18	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanjabbbar	2 dokumen	Rp	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 dokumen	Rp	250.000.000
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan		100%	Rp	2.237.000.000		100%	Rp	2.410.000.000
2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah PKK dan Posyandu yang diberdayakan		422	Rp	2.237.000.000		422	Rp	2.410.000.000
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tanjabbbar	422 lembaga	Rp	650.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	422 lembaga	Rp	660.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitas: pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Kab. Tanjungbar	1 dokumen	Rp 200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dokumen	Rp 250.000.000
2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitas: pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitas pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi tepat guna	Kab. Tanjungbar	1 laporan	Rp 160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 laporan	Rp 170.000.000
2.13.05.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitas: Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tanjungbar	1 laporan	Rp 127.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 laporan	Rp 130.000.000
2.13.05.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitas: Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitas Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjungbar	1 dokumen	Rp 1.100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dokumen	Rp 1.200.000.000
JUMLAH					Rp 11.886.420.000			Rp 12.334.520.000

Kuala Tungkal,

2023

Rt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



M. H. M. M. D. Natsir, S.I.P.
Rencana Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Sasaran	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif kebutuhan dana TA.2024	Praktiraan Maju Tahun 2025	Sumber Dana
				Hasil Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kualitas pengelolaan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80					Rp 5.658.420.000	Rp 5.133.520.000	
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Jumlah dokumen tahunan yang disusun	6 dokumen			Rp 60.000.000	Rp 65.000.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.2.01.06	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMID Kab. Tanjabbar	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	Rp 60.000.000	Rp 65.000.000	
01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan SKPD			Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100%			Rp 3.644.100.000	Rp 3.694.200.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. Tanjungbar	Meningkatnya kesejahteraan pegawai				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang	Rp 3.450.000.000	Rp 3.500.000.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.2.02.02	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMD Kab. Tanjungbar	Meningkatnya semangat dalam bekerja				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Rp 194.100.000	Rp 194.200.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Meningkatnya kedisiplinan pegawai Dinas PMD	Persentase peningkatan kehadiran pegawai	100%				Rp 70.900.000	Rp 71.900.000	
01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiatan Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD Kab. Tanjungbar	Meningkatnya kerapian pegawai Dinas PMD				Jumlah paket pakaiatan dinas beserta atribut kelengkapannya	100 paket	Rp 53.900.000	Rp 53.900.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	DPMD Kab. Tanjungbar	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja pegawai Dinas PMD				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	Rp 17.000.000	Rp 18.000.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.02.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah		Meningkatnya kinerja bagi pegawai Dinas PMD	Persentase peningkatan kinerja pegawai	100%				Rp 726.420.000	Rp 830.420.000	
01.02.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD Kab. Tanjungbar	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	Rp 9.000.000	Rp 10.000.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.02.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD Kab. Tanjungbar	Tersedianya alat tulis kantor				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	56 paket	Rp 46.000.000	Rp 47.000.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.06.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	DPMID Kab. Tanjabbar	Tersedianya makan minum rapat			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1224 paket	Rp 21.420.00	Rp 21.420.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
01.02.06.0 5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMID Kab. Tanjabbar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	Rp 43.000.000	Rp 44.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
01.02.06.0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMID Kab. Tanjabbar	Tersedianya bahan bacaan			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1500 dokumen	Rp 7.000.000	Rp 8.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
01.02.06.0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMID Kab. Tanjabbar	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550 laporan	Rp 600.000.000	Rp 700.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
01.02.07	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penujang urusan pemerintahan daerah		Meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan		Jumlah pengadaan BMD			Rp 465.000.000	Rp 145.000.000	
01.02.08.0 1	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMID Kab. Tanjabbar	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	11 unit motor	Rp 330.000.000	Rp -	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
01.02.08.0 2	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	DPMID Kab. Tanjabbar	Tersedianya mebel			Jumlah paket mebel yang disediakan	30 unit	Rp 105.000.000	Rp 105.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
01.02.08.0 4	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DPMID Kab. Tanjabbar	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	Rp 30.000.000	Rp 40.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

										tan asli daerah				
01.02.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan		Persentase peningkatan kenyamanan kantor	100%		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Rp 94.000.000	Rp 96.000.000			Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.02.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD Kab. Tanjungbar	Tersedianya jasa surat menyurat					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000			Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.02.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMD Kab. Tanjungbar	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 25.000.000	Rp 26.000.000			Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah
01.02.09.01	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarakan pajaknya	13 unit	Rp 165.000.000	Rp 170.000.000			Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah

	kendaraan dinas jabatan																		
01.02.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMMD Kab. Tanjungbar	Terpeliharaanya peralatan kantor				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	Rp 15.000.000	Rp 16.000.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah								
01.02.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMMD Kab. Tanjungbar	Terpeliharaanya gedung kantor				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	Rp 418.000.000	Rp 45.000.000	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								Rp 6.228.000.000	Rp 7.201.000.000									
2.13.02	Program Penataan Desa		Meningkatnya penataan desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	100%	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan desa			Rp 250.000.000	-	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah								
2.13.02.2.01	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa			114 desa			Rp 250.000.000	-	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah								
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Desa Suban Kec. Batang asam dan Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi	Meningkatnya jumlah desa				Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	2 desa	Rp 250.000.000	-	Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah								
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Meningkatnya Kerjasama desa	Persentase peningkatan desa yang melakukan Kerjasama	100%				Rp 160.000.000	Rp 170.000.000									

RENCANA KERJA 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.03.2.01	Kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kerjasama antar desa		Persentase peningkatan kerjasama antar desa	100%													Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah
2.13.03.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Tanjung Barat																	Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa																		
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraannya administrasinya	114 Desa													Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Kab. Tanjung Barat	Terlaksananya evaluasi peraturan desa																Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya perencanaan pembangunan desa																Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang baik					Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	Rp 220.000.000	Rp 220.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah desa					Jumlah aparaturn pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	(129 orang)	Rp 320.000.000	Rp 400.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya keberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa					Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen	Rp 251.000.000	Rp 251.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab. Tanjung Barat	Terselenggarakannya Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa					Jumlah laporan hasil pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	15 laporan	Rp 750.000.000	Rp 1.980.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan fasilitas penyusunan profil desa	Kab. Tanjung Barat	Terselenggarakannya penyusunan profil desa					Jumlah dokumen profil desa	1 dokumen	Rp 287.000.000	Rp 287.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya pengelolaan aset desa yang baik					Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen	Rp 400.000.000	Rp 120.000.000	Dana Transfer Umum- pendapa tan asli daerah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa				Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	Rp 212.000.000	Rp 212.000.000	Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.15	Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan penegakan batas desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya jumlah desa dengan batas yang jelas				Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegakan batas desa	10 desa	Rp 360.000.000	Rp 370.000.000	Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.16	Sub Kegiatan Fasilitas pembinaan laporan kepala desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kualitas laporan kepala desa				Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	114 laporan	Rp 167.000.000	Rp 167.000.000	Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah
2.13.04.2.01.18	Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya perkembangan desa dan kelurahan				Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Dana Transfer Umum-pendapa tan asli daerah
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	100%				Rp 2.237.000.000	Rp 2.410.000.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

<p>2.13.05.2.01</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat adat yang masyarakat adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota</p>		<p>Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</p>	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan posyandu dan PKK yang diberdayakan</p>	<p>422</p>	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya</p>	<p>Dana Transfer Umum-pendapatan asli daerah</p>
<p>2.13.05.2.01.03</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat</p>	<p>Kab. Tanjung Barat</p>	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>		<p>422 lembaga</p>	<p>Rp 650.000.000</p>	<p>Rp 660.000.000</p>
<p>2.13.05.2.01.05</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa</p>	<p>Kab. Tanjung Barat</p>	<p>Meningkatnya usaha ekonomi desa</p>		<p>1 dokumen</p>	<p>Rp 200.000.000</p>	<p>Rp 250.000.000</p>
<p>2.13.05.2.01.06</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</p>	<p>Kab. Tanjung Barat</p>	<p>Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna</p>		<p>1 laporan</p>	<p>Rp 160.000.000</p>	<p>Rp 170.000.000</p>
<p>2.13.05.2.01.06</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong</p>	<p>Kab. Tanjung</p>	<p>Terfasilitasinya Kegiatan Bulan</p>		<p>1 laporan</p>	<p>Rp 127.000.000</p>	<p>Rp 130.000.000</p>

RENCANA KERJA 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	Royong Masyarakat	Barat	Bhakti Gotong Royong Masyarakat						Gotong Royong Masyarakat								Umm- pendapa tan asli daerah
2.13.05.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitas Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjung Barat	Telaksananya 10 program pokok PKK						Jumlah dokumen hasil fasilitas Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	Rp 1.100.000.000	Rp 1.200.000.000					Dana Transfer Umm- pendapa tan asli daerah
JUMLAH																	
											Rp 11.886.420.000	Rp 12.334.520.000					

Kuala Tunggal, 2023

Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD MAFSIR, S.IP
Pengra/Tunggal I
NIP. 19840624 201101 1 005

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka untuk penetapan rencana kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Keberhasilan dari rencana kerja bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal sesuai dengan tujuan RPJMD 2021-2026. Untuk itu diperlukan saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang, sehingga perencanaan lebih baik lagi.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kuala Tungkal, 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005